

BPK Perlu Audit Pengadaan Mobil

DPR Terima Pengajuan Anggaran Dua Kali

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pemeriksa Keuangan perlu mengaudit pengadaan mobil pejabat negara. Pemeriksaan BPK yang dapat menentukan apakah ada pelanggaran spesifikasi pembelian atau perubahan pembelian yang tak sesuai peruntukan.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis menyampaikan hal itu dalam perbincangan dengan *Kompas*, Minggu (3/1), terkait pemberitaan pengadaan mobil Toyota Crown Royal Saloon untuk menteri atau pejabat setingkat menteri.

"Biar BPK memeriksa dalam pemeriksaan APBN Perubahan 2009," kata Harry. Laporan BPK itu diharapkan sudah disampaikan kepada DPR pada pertengahan 2010 dan dibahas dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2009 pada Badan Anggaran DPR.

Menurut Harry, sesuai APBN 2009 yang disahkan DPR pada Oktober 2009, anggaran pengadaan kendaraan untuk menteri, pejabat setingkat menteri, dan ketua/wakil ketua lembaga tinggi negara dialokasikan dalam ang-

garan mendesak Departemen Keuangan dengan kuasa pengguna sebesar Rp 63,99 miliar. Anggaran itu untuk 79 kendaraan dengan nilai satuan Rp 810 juta.

Namun, sehari sebelum pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu berakhir, 19 Oktober 2009, Menkeu mengajukan lagi anggaran sebesar Rp 62,805 miliar untuk pajak mobil sesuai surat nomor 652/MK.02/2009. Anggaran itu lalu dibahas dan disetujui Badan Anggaran DPR 2009-2014 pada 3 November 2009 sehingga total menjadi Rp 126,79 miliar.

Apabila memerhatikan anggaran pengadaan barang umumnya, Harry menduga, anggaran Rp 63,99 miliar itu biasanya termasuk pajak. DPR tidak mengetahui pasti karena hanya membahas besaran anggaran. Pemerintahan juga tidak menginforma-

sikan jenis dan harga mobil. Begitu pula saat Badan Anggaran DPR membahas dan menyetujui pengajuan anggaran Rp 62,805 miliar untuk pajak yang diajukan Depkeu belakangan.

Keterangan pemerintah terkait pengadaan mobil pejabat, berdasarkan catatan *Kompas*, berubah-ubah. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, jumlah mobil pejabat sebanyak 150 mobil dinas baru, tetapi diubah menjadi 79 buah.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida merencanakan mengembalikan mobil dinas itu. Ia menilai mobil itu terlalu mewah dan sangat mahal dibanding mobil dinas sebelumnya, Toyota Camry, yang harganya hanya sekitar Rp 300 juta (harga lama).

Sebaliknya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih memakai mobil pribadinya. "Saya tidak mau berpolemik. Saya juga tidak mau nanti dikira *sok-sokan*. Jadi, saya pakai mobil ini," ucapnya. Mobil Pramono adalah Lexus. (SUT)